



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1983).
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998).
- \_\_\_\_\_, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Arikuntoro, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rianeka Cipta, 2002).
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Effendy, Marwan, *Sistem Peradilan Hukum Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, (Jakarta: Referensi, 2012).
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007).
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Irianto, Sulistyowati Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005).
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2011).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nawari, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).

- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1986).
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Themis Books, 2005).
- \_\_\_\_\_, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).
- \_\_\_\_\_, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Alumni, 2013).
- Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).
- Syamsyah, Tn, *Tindak Pidana Perpajakan*, (Bandung: PT Alumni, 2011).
- Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, (Yogyakarta : Tiara Yoga, 1992).

## **B. Jurnal, Makalah, Majalah**

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi*, (Jurnal Legislasi Indonesia, I, Maret, 2007), hal 34.
- Septiana Dwiputrianti, *Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume VI, No. 3, September 2009.
- Silvester Dalise, *Tugas Dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. II, No. 5, September 2013, hal. 73.
- Amin Rahayu, *Sejarah Korupsi di Indonesia*, Amanah No. 55, Oktober, 2004, hal. 34.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Penguasa Militer Nomor. Prt/Perpu/1957 tentang Pemberantasan Korupsi;

### D. Website

Anti Corruption Clearing House, *Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/pp-71-tahun-2000-peran-serta-masyarakat-dalam-pemberantasan-korupsi>, pada tanggal 21 Oktober 2018 Pukul 10.30.

CNN Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Masih Kalah dari Malaysia*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190129215750-12->